

“Fintech” Ilegal Incar Masyarakat Saat Pandemi

Tanggal : Senin , 28 September 2020
Media : Koran Jakarta
Halaman : 5
Wartawan : Ant
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Tongam Lumban Tobing (Ketua Satgas Waspada Investasi OJK)
Rubrik : Ekonomi
Topik : Fintech Ilegal

Perlindungan Konsumen

“Fintech” Ilegal Incar Masyarakat saat Pandemi

JAKARTA – Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan tawaran dari *fintech lending* ilegal dan investasi tanpa izin masih banyak bermunculan di masyarakat dan mengincar kalangan yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19.

Hingga September ini Satgas Waspada Investasi dalam operasinya kembali menemukan 126 *fintech peer to peer lending* ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

“Kami masih menemukan penawaran fintech lending ilegal dan investasi tanpa izin yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat di masa pandemi ini. Fintech lending dan tawaran investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat,” ujar Tongam dalam pernyataan di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurut Tongam, pinjaman dari *fintech lending* ilegal selalu mengenakan bunga tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Semua temuan Satgas Waspada Investasi ini identitasnya sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk diblokir aksesnya di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas *fintech lending* ilegal ini kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Ikuti Ketentuan

Selain itu, Satgas juga mengapresiasi kebijakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan berizin OJK melakukan penawaran melalui SMS

sesuai dengan ketentuan OJK. Sehingga bisa dipastikan

bahwa jika ada penawaran pinjaman dana fintech lending melalui SMS berarti itu dilakukan oleh *fintech lending* ilegal yang sebaiknya dihindari.

Pasal 43 POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan larangan melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.

Adapun total *fintech* ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak tahun 2018 sampai September 2020 mencapai 2840 entitas.

Selain kegiatan *fintech peer-to-peer lending* ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 32 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat karena melakukan penipuan dengan menawarkan pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin.

■ Ant/E-10



Tongam Lumban Tobing
Ketua Satgas Waspada Investasi

ISTIMEWA